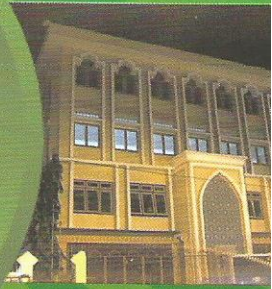


PENYUSUN

ZAMAH SARI | BUNYAMIN | AFNI RASYID | HILAL RAMADAN
RIFMA GHULAM DZALJAD | MUHAMMAD DWI FAJRI | ABDURAHMAN WAHID



KEMUHAMMADIYAHAN

- Muhammadiyah dan Pembaharuan Islam
- Landasan Ideologis Berdirinya Muhammadiyah
- Landasan Ideologis Gerakan Muhammadiyah
- Strategi Muhammadiyah
- Muhammadiyah dan Tajdid
- Struktur Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah
- Pemberdayaan Ranting
- 'Aisyiyah dan Gerakan Pemberdayaan Perempuan
- Muhammadiyah dan Kebudayaan
- Muhammadiyah dan Ekonomi
- Muhammadiyah dan Pemberdayaan Mustadl'afin
- Aksi Dakwah Lapangan

Bab XIII

MUHAMMADIYAH DAN EKONOMI

Pendahuluan

Istilah “ekonomi” berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum”. Karena itu secara sederhana ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Karena itu secara umum, ekonomi dipahami sebagai salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa.

Karl Polanyi, C.M. Arensberg, dan H.W. Pearson dalam *“The Economy as Instituted Process”* menjelaskan bahwa ekonomi memiliki 2 (dua) arti, yakni arti dasar dan arti formal. Arti dasar dari kenyataan, sedang arti formal berasal dari logika. Secara utuh Polanyi, Arensberg, dan Pearson menjelaskan kedua arti tersebut, yaitu: *Pertama*, arti dasar ekonomi berasal dari ketergantungan hidup manusia pada alam dan sesamanya. Arti ini berkenaan dengan tukar menukar antara manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya, sepanjang hal ini menghasilkan baginya alat untuk memuaskan kebutuhan materialnya. *Kedua*, arti formal ekonomi berasal dari logika kaitan antara alat dan tujuan, seperti tercermin dalam kata-kata “hemat” atau “berhemat”. Arti ini menyangkut suatu situasi tertentu yang berisi pilihan, yakni pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sarana. Keharusan memilih ini timbul karena tidak cukup tersedianya sarana.¹⁶⁰

160 Karl Polanyi, C.M. Arensberg, H.W. Pearson, *Ekonomi Sebagai Proses Sosial*, dalam Hans Dieter Evers (Penyunting), 1988, *Teori Masyarakat: Proses Peradaban*

Kedua arti ekonomi di atas meniscayakan bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan sosial yang tidak bisa dilepaskan dari interaksi antar manusia dan proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Interaksi antar manusia tampak dalam perilaku timbal-balik (*reciprocity*), perilaku berbagi (*redistribution*), dan perilaku tukar-menukar (*exchange*) yang umum terjadi di dalam masyarakat. Lebih dari itu, pemaknaan ekonomi sebagai proses sosial tampak jelas pada posisi manusia, baik sebagai makhluk sosial (*homo sapiens*) maupun makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang tidak bisa lepas dari berbagai persoalan ekonomi. Inti masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas atau pemenuhan terhadap kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Itulah kenapa, persoalan ekonomi tidaklah semata-mata urusan kebutuhan pokok sehari-hari, sandang, pangan dan papan, tetapi sudah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai bentuk-bentuk perdagangan, penggunaan uang, dan unsur-unsur pasar memperlihatkan hampir keseluruhan hidup manusia senantiasa didasarkan pada tindakan dan sistem nilai yang tidak bisa dilepaskan dari aspek *interest* (kepentingan) yang dominan motif ekonomisnya.

Namun begitu, tulisan ini secara umum hanya berusaha memberikan pemahaman sederhana mengenai ekonomi dan kebutuhan manusia terhadap aspek atau bidang ekonomi, sementara lebih khususnya akan dipaparkan lebih banyak hal yang terkait dengan konteks mobilitas ekonomi umat beragama serta perkembangan, kontribusi, dan pergulatan ekonomi di dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Agama dan Mobilitas Ekonomi

Agama sebagai instrumen perubahan sosial (*social reform*) meniscayakan bukan hanya berisi nilai ajaran tentang tatanan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, tetapi juga menjadi basis pemihakan terhadap kelompok minoritas, kaum lemah (*dhu'afa*), fakir miskin, dan kaum tertindas (*mustadh'afin*). Agama dengan demikian bukan sekedar nilai ajaran yang mengatur urusan tentang akhirat, alam ruhani, dan dunia batin (spiritualitas) semata, melainkan agama juga mengajarkan manusia tentang tata kehidupan duniawi, pergaulan antar sesama

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta berbagai macam urusan muamalah dunyawiyah lainnya.

Agama karenanya menginspirasi banyak manusia untuk menyeimbangkan kehidupan ruhani dan jasmani, akhirat dan duniawi, serta material dan spiritual dengan baik. Agama menjadi simbol keyakinan yang kuat sekaligus simbol perjuangan dan amal nyata dalam mewujudkan suatu tata kehidupan, baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Agama tidak berhenti hanya pada slogan *amantu billah* (saya beriman kepada Allah), melainkan ia menjadi spirit dan kekuatan nyata untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan, baik dalam wujud amal baik, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, pengorbanan terhadap orang lain, pengabdian kepada negara, maupun 1001 model kebajikan sosial lainnya.

Clifford Geertz yang terkenal dengan karya monumentalnya *"The Religion of Java"* mengatakan bahwa antara masjid dan pasar menunjukkan hubungan historis dan fungsional antara Islam dan perdagangan. Hubungan itu bukan hanya dapat dilihat berdasarkan sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Saw, penyebaran Islam di tanah air, hingga dalam bentuk pola hubungan masyarakat Indonesia. Hubungan masjid dan pasar sesungguhnya meniscayakan satu keyakinan yang mengintegrasikan keyakinan akan Tuhan yang transenden tetapi imanen¹⁶¹ dalam kehidupan alam duniawi manusia. Tuhan begitu jauh tetapi teramat dekat dan terlibat dalam kehidupan manusia, apapun itu baik di dunia maupun di akhirat. Satu sisi manusia berinteraksi dengan spiritualitas yang hakiki dan sacral dalam bentuk aqidah dan ibadah

161 Imanen atau imanensi adalah faham yang menekankan berpikir dengan diri sendiri atau subyektif. Istilah imanensi berasal dari Bahasa Latin *immanere* yang berarti "tinggal di dalam". Imanen adalah lawan kata dari transenden. Pertama kali, istilah ini diajukan oleh Aristoteles yang memiliki arti "batin" dari suatu obyek, fenomena atau gejala. Kemudian dikembangkan oleh Kant dan berlaku sampai sekarang. Dalam istilah *Filsafat Ketuhanan*, Tuhan yang imanen berarti Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Berbeda dengan transenden yang sangat mengagungkan Tuhan yang begitu jauh sehingga mereka sangat hormat. Imanensi lebih dekat dan terbatas pada pengalaman manusia, seperti dikemukakan Hume dalam teori *fenomenalisme empiris* dan Kanti dalam *Critique of Pure Reason*. (lihat Lorens Bagus., *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

hanya kepada Allah, tetapi disisi lain tidak melupakan kenyataan hidup duniawi yang serba profan yaitu melakukan muamalah dunyawiyah dan berakhlak dengan sesama makhluk sesuai yang diperintahkan Allah kepada manusia. Di dalam QS. al-Qashash/28: 77 Allah mengingatkan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat tetapi tidak boleh melupakan bagian kenikmatan kehidupan dunia. Itulah kenapa di dalam QS. al-Jumu'ah/62: 9-11 umat Islam diingatkan untuk menunaikan shalat Jum'at berjamaah, meninggalkan jual-beli ketika panggilan adzan Jum'at berkumandang, tetapi setelah shalat Jum'at selesai umat Islam diperintahkan bertebaran kembali dimuka bumi untuk bekerja, melakukan perniagaan dan mencari penghidupan (karunia Allah).¹⁶²

Selain keterkaitan antara masjid dan pasar, kita dapat menelusuri mobilitas ekonomi umat Islam berdasarkan arsitektur tata ruang kota-kota di Indonesia, dimana umumnya menempatkan model tata ruang kota sebagaimana tata ruang kota Madinah seperti pada zaman Nabi SAW, yaitu di pusat kota Madinah terdapat alun-alun dengan kantor pusat pemerintahan, masjid agung, pasar, dan posko keamanan atau penjara. Tipikal arsitektur kota ini sudah diterapkan di Indonesia sejak zaman Mataram Islam dan secara substansi memiliki makna yaitu ingin memadukan penyelenggaraan urusan duniawi sekaligus urusan akhirat berlangsung secara seimbang.

Demikian halnya jalur penyebaran Islam dari Arab melalui Gujarat masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran itu dilakukan dengan jalan damai bukan dengan perang dan kekerasan sebagaimana sering dituduhkan para Orientalis Barat¹⁶³ atau seperti kuliah umum

162 Asbabun Nuzul Surat al-Jumu'ah/62 ayat 11 sebagaimana ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut: Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir, ia berkata: "pernah datang satu rombongan perniagaan ke kota Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW tengah berkhotbah. Kemudian orang-orang yang mendengar khutbah itu segera keluar sehingga yang tersisa hanya dua belas orang, maka turunlah QS. al-Jumu'ah/62: 11

رَأَىٰ جَاهِدًا أَوْ لَهْجَةً أَوَّلَهُمْ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ النَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)).

Di antara kedua belas orang yang tetap tinggal bersama Rasulullah SAW terdapat Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab ash-Shahihain, dari hadits Salim.

163 Orientalisme adalah istilah yang merujuk pada peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya Timur di Barat oleh para pemilik, penulis, desainer, dan se-

Paus Benediktus XVI di Universitas Regensburg Bavaria, Jerman pada tanggal 13 September 2006¹⁶⁴. Faktanya Islam disebarkan dengan mengedepankan etos dan pola hubungan perdagangan. Hubungan yang mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam sekaligus sistem budaya dan sistem sosial ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Apa yang terjadi pada Islam hampir sama dengan yang terdapat dalam agama Kristen. Dalam tradisi Kristen disebutkan bahwa etika Protestanisme merupakan akar keyakinan yang kemudian mewujudkan tumbuh dan berkembangnya spirit Kapitalisme modern di Barat sejak akhir abad ke-16 dan sesudahnya. Dalam *The Protestant Ethic* (2005:56), Max Weber menekankan betapa penting predestinasi dalam keyakinan Calvinis¹⁶⁵. Ide utamanya terletak pada: bagaimana para Calvinis yakin

niman. Sejak abad ke-19, "orientalis" telah menjadi istilah tradisional untuk para ahli dalam bidang studi Oriental. Orientalisme lebih digunakan secara luas sebagai istilah yang merujuk pada karya-karya seniman Prancis pada abad ke-19, yang mengandung unsur-unsur yang didapat dari perjalanan mereka ke negara-negara di luar Eropa, khususnya Afrika Utara dan Asia Barat. Tetapi belakangan studi Orientalisme justru lebih kaya dengan catatan dan pemikiran Barat tentang hubungan Barat Islam, dunia Timur, Islam, dan segala aspek pemikiran maupun konfigurasi keyakinan, ekonomi, politik, hukum maupun budaya. (Lihat: Edward W Said, *Orientalism*, New York: Pantheon Books, 1978 yang sudah diterjemahkan oleh Penerbit Pustaka Bandung tahun 1994).

164 Di dalam Kuliah umum tersebut Paus Benediktus XVI mengutip kata-kata Kaisar Manuel II yaitu: ...Kaisar pasti tahu, bahwa dalam Surat 2:256 dikatakan mengenai tiadanya paksaan untuk urusan iman - itu satu di antara Surat-surat pertama dari masa, ketika Muhammad sendiri dalam kondisi lemah dan terancam. Kaisar tentu tahu juga akan yang tertulis dalam Al Qur'an - kelak tersusunnya - ketentuan mengenai Perang Suci. Tanpa mau masuk ke dalam rinci-rincian, bagaimana hubungan antara umat Ahli Kitab dan Orang Tak Beriman, Kaisar secara mengherankan memakai cara langsung ke dalam pertanyaan utama tentang hubungan antara agama dan kekuasaan kepada rekan bicaranya. *Ia berkata "Tunjukkanlah, apa yang dibawa Muhammad dan Anda hanya akan menemukan yang buruk dan tidak manusiawi, seperti bahwa ia memerintahkan agar iman yang diwartakannya disebarluaskan dengan pedang. Hal itu bertentangan dengan kodrat Allah dan kodrat jiwa". <http://www.open-subscriber.com/message/mediacare@yahooogroups.com/4928915.html>

165 Predestinasi dalam teologi Kristen adalah doktrin bahwa semua peristiwa telah dikehendaki oleh Allah. Yohanes Calvin menafsirkan predestinasi alkitabiah berarti bahwa Allah menghendaki hukuman kekal bagi sebagian orang dan keselamatan bagi orang lain. Predestinasi dapat dipahami juga sebagai *foreordaining* Ilahi atau prapengetahuan dari semua yang akan terjadi, sehubungan dengan keselamatan dari beberapa dan bukan bagi yang lain. Benihnya terdapat pada konsep predestinasi di

bahwa mereka termasuk di antara orang-orang terpilih? Dalam teologi Calvinis, terdapat predestinasi ganda yang membuat para Calvinis tidak tahu secara pasti apakah mereka termasuk orang terpilih atau terkutuk? Karena Tuhan Calvinis adalah begitu transenden, maka mereka menghadapi masalah serius tentang ketidakpastian keagamaan. Situasi ini memaksa para Calvinis mencari *certitudo salutis*, yang didefinisikan Weber (1978:1198-99) sebagai suatu indikasi bahwa mereka termasuk orang terpilih yang selamat ke surga. Karena itu, sukses di dunia bisnis dan pengumpulan harta kekayaan demi pemuliaan Tuhan diyakini sebagai “tanda” atau “konfirmasi” bahwa mereka termasuk di antara orang-orang terpilih, atau dalam istilah Weber “suatu tanda keberkahan Tuhan”.¹⁶⁶

Sebaliknya terkait dengan Islam, menurut Weber, Islam berlawanan dengan Calvinisme. Tidak ada predestinasi ganda dalam Islam. Malahan, menurut Weber (2005:185), Islam memiliki keyakinan pada predeterminasi, bukan predestinasi, dan berlaku pada nasib seorang Muslim di dunia ini, bukan di akhirat kelak. Jika doktrin predestinasi diyakini Calvinis untuk memotivasi etos kerja keras, hal demikian tidak terjadi pada Muslim. Malahan, lanjut Weber, doktrin predestinasi tidak memainkan peran dalam Islam. Akibatnya, Muslim bersikap kurang positif terhadap aktivitas di dunia-sini dan pada akhirnya terjatuh pada sikap fatalistik.¹⁶⁷

Meski pandangan Weber demikian, namun bila kita teliti lebih jauh maka masyarakat Islam pertama merupakan komunitas yang dicirikan oleh kelas *entrepreneur* (pedagang) dan kaum urban. Rasulullah Saw dan para sahabat merupakan pedagang atau pengusaha sukses yang keberhasilannya dalam bisnis menjadi modal dalam mendukung dakwah dan perjuangan Islam. Sejarah mencatat kehandalan Nabi Saw dalam berdagang, serta kesuksesan dan kedermawanan Abu Bakar, Usman Ibn Affan, Abdurrahman Ibn Auf, dan sahabat lainnya.

matkan pada “paradoks kehendak bebas,” dimana Allah Yang Maha Kuasa dipertentangkan dengan kehendak bebas manusia.

166 Sukidi, *Erika Protestan Muslim Puritan Muhammadiyah sebagai Reformasi Islam Model Protestan*, Kompas, Bentara, Rabu, 01 Juni 2005.

Muhammadiyah dan Penguatan Ekonomi Umat

Ketika membaca surat al-Maun/107: 3 yang berbunyi: “*wala yahuddu ‘ala tha’amil miskin...*” (dan ia tidak menganjurkan member makan orang miskin), Muhammadiyah sebenarnya tidak lepas dari persoalan ekonomi. Pengentasan kaum *mustadh’afin* yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah tidaklah berhenti pada aspek memberikan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang miskin dan papa. Muhammadiyah mendirikan panti asuhan dan panti jompo, balai pengobatan dan rumah sakit, serta sekolah dan pesantren. Dahlan tidak sekedar menekankan pentingnya memantapkan kesejahteraan dan kesinambungan gerakan dakwah sosial terhadap fakir miskin dan mereka yang tidak mampu, melainkan beliau juga memikirkan langkah besar bagaimana agar persyarikatan dapat mengiatkan gerakan ekonomi yang tidak sekedar sebagai sumberdana dakwah dan operasional persyarikatan.

Dahlan pernah memberi nasehat secara tegas: “*hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah*”. Nasehat itu menekankan kesadaran bahwa warga Muhammadiyah harus sukses dunia, menjadi orang yang berkecukupan secara materi, sehingga memungkinkan dirinya bukan hanya aktif mengabdikan diri dan tenaganya bagi persyarikatan, melainkan ia juga dapat memberi kontribusi material atau mengorbankan harta bendanya bagi dakwah dan perjuangan Muhammadiyah. Hal ini senada dengan pidato beliau di dalam Kongres Umat Islam Pertama di Cirebon. Menurut Kyai Dahlan seorang pemimpin itu harus dapat memberi kebaikan dan kesejahteraan bagi umatnya. Karena itu, pemimpin tidak cukup hanya cerdas dan luas wawasan keilmuannya, ia harus pula berkecukupan atau memiliki harta benda. Dengan begitu, ia dapat memberikan penyadaran kepada umat, sekaligus melakukan pemberdayaan dengan memberikan harta benda bagi untuk kecukupan hidup dan perbaikan kesejahteraan umat. Sekalipun sebagai pribadi, ia tetap dituntut harus hidup bersahaja, sebagaimana yang diterapkan Dahlan dengan berkaca pada kehidupan Nabi Saw maupun para sahabat.

Selanjutnya, kalau kita cermati terdapat banyak kemiripan antara periode Nabi Saw dengan para sahabat dengan keberadaan Muhammadiyah di awal kelahirannya yang juga dicirikan oleh urbanisme

dan semangat wirausaha (etos ekonomi). Dimana kita ketahui pada saat itu, kebanyakan anggota Muhammadiyah merupakan warga kota atau kaum pendatang yang hijrah dari desa atau perkampungan. Mereka menyikapi suasana dan kondisi yang relatif baru untuk berwirausaha. Jika komunitas warga pedesaan umumnya bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan, maka sebagian besar warga Muhammadiyah memilih profesi sebagai pedagang. Sebagai contoh kita dapati seperti KH Ahmad Dahlan adalah seorang pedagang batik, demikian juga sebagian besar tokoh-tokoh Muhammadiyah awal. Itulah kenapa Muhammadiyah periode awal mewakili tipikal Muhammadiyah yang memiliki independensi yang lebih kuat dan berani. Kondisi ini berbeda dengan era Muhammadiyah tahun 1980-2000an, dimana mayoritas warga dan pimpinan Muhammadiyah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mewakili kelas menengah yang patuh, terikat dengan birokrasi pemerintahan, dan lebih bersikap kooperatif.

Keaktifan KH. Ahmad Dahlan dalam berdagang menjadikannya masuk ke dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) pimpinan H. Samanhudi, yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) di tahun 1912 dengan ketuanya HOS. Cokroaminoto. Di dalam gerakan SI, Dahlan bersama para pedagang anggota SI mengelorakan gerakan pribumisasi ekonomi untuk melawan dominasi dan monopoli para pedagang Cina dan Belanda. Dahlan mendapatkan pelajaran tentang pentingnya kemandirian ekonomi dan keharusan secara swadaya memenuhi kebutuhan sendiri. Itulah kenapa di samping dicirikan oleh militansi para pedagang pribumi, sejarah juga mencatat bahwa Kauman dan Kotagede di Yogyakarta, Solo Lama, serta Pekajangan Pekalongan merupakan basis ekonomi pribumi yang cukup eksis dan lepas dari pengaruh dan monopoli pedagang Cina dan Belanda.

Dalam perkembangannya tercatat paling tidak sampai akhir tahun 1960-an masih terlihat keberhasilan pembinaan ekonomi perajin dan pedagang kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta, batik dan tekstil di Solo, tekstil dan bordiran di Pekajangan Pekalongan, Tasikmalaya, Tulungagung, Ponorogo dan Bangil Jawa Timur. Para pedagang Muhammadiyah dan pribumi ini mewakili kelas menengah baru yang lumayan aktif dan cukup berpengaruh hingga awal tahun 1980-an sebelum kemudian hilang ditelan hegemoni pedagang Cina dan tergenjil kebijakan Orde Baru yang tidak memihak pedagang pribumi. Sebelum tahun 1960-an terdapat banyak lahir kelompok pedagang dan pengusaha

di Kotagede, Karangajen, Prawirotan dan Kauman Yogyakarta. Demikian halnya di Bekonang Solo akhir tahun 1960-an, terdapat beberapa nama pengusaha batik ternama, seperti: Purwo Suhardjo, Karno Suhardjo, Sugiarto, Abdur Rozaq, dan lain-lain. Kemudian tersebut beberapa nama produk batik terkenal saat itu, seperti: batik tulis Cap Banteng dan Terompet.¹⁶⁸ Semua cerita kemajuan pedagang pribumi dan pengusaha batik di Yogyakarta, Solo, Pekajangan, maupun daerah lain mulai menurun dan *collaps*, selain karena kebijakan ekonomi negara yang tidak memihak, juga diakibatkan keterbatasan modal, berdiri banyak pabrik besar dengan mesin pemintal dan pewarna modern, serta adanya modal besar yang melakukan monopoli penguasaan pasar dan jalur distribusi.

Namun demikian, keberadaan para pedagang Muhammadiyah pada periode awal persyarikatan ini didirikan bukan hanya sebagai catatan sejarah, melainkan semangat dan tindakan dagang itu cukup lama dipraktekkan di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah. Dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya warga Muhammadiyah berusaha mengusahakannya secara bersama-sama dengan menghidupkan perdagangan minimal di antara sesama warga Muhammadiyah. Kebutuhan akan sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, minyak angin, balsem, kripik, snack atau makanan, minyak goreng, aneka kerajinan tangan, hingga pakaian dan kebutuhan sehari-hari lainnya diproduksi dan didistribusikan dari dan oleh warga Muhammadiyah sendiri. Kondisi ini cukup lama bertahan di sebagian besar komunitas warga Muhammadiyah, sebelum kemudian tergilas oleh monopoli dan liberalisasi pedagang Cina dan industri skala besar.

Pergeseran kekuatan ekonomi dunia dan apa yang terjadi kemudian, sesungguhnya sudah diperkirakan M. Dawam Rahardjo, bahwa suatu saat nanti kekuatan ekonomi atau modal besar akan mengeser kekuatan simbolik umat. Hal ini diperkuat oleh Kuntowijoyo, menurutnya perkembangan ekonomi yang dicita-citakan Muhammadiyah tampaknya terbatas hanya pada ekonomi praindustri, industri awal, dan kapitalisme awal dengan pengusaha kecil dan menengah sebagai tulang punggungnya. Karenanya menghadapi persaingan global, Muhammadiyah tidak boleh hanya berkutat dengan pengembangan

¹⁶⁸ Sutrisno Kuntowijoyo, 1998, *Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 310.

ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Muhammadiyah dituntut harus memiliki konsep ekonomi besar dan multinasional dengan infrastruktur modal, sumberdaya alam, dan pasar besar tetapi dengan basis nilai dan kemanfaatan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat.

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah: Dilema Revitalisasi Ekonomi Umat

Secara umum dapat dicatat beberapa agenda, program atau kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bersinggungan dengan ekonomi, yaitu: *Pertama*, sejak tahun 1921 Muhammadiyah memprogramkan perbaikan ekonomi rakyat, namun baru pada tahun 1930 terrealisasi salah satu programnya, yaitu terbentuknya komisi penyaluran tenaga kerja. *Kedua*, untuk mendukung jalannya roda persyarikatan Muhammadiyah yang berbasis *jama'ah* di setiap ranting, maka dibuat kebijakan pengumpulan *dana dakwah* melalui *jimpitan*, yaitu setiap akhir pekan pengurus atau tenaga sukarela mengumpulkan jariah dari warga Muhammadiyah dalam bentuk sumbangan beras atau uang yang hasilnya dikumpulkan untuk operasional persyarikatan. *Ketiga*, tahun 1968, Mukhtar ke-37 di Yogyakarta menetapkan program Pemasa (Pembangunan Masyarakat Desa) dan dibentuk Biro Pemasaran sebagai pelaksanaannya. Program ini bertujuan menyiapkan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di pedesaan, Program ini merupakan strategi dakwah Muhammadiyah dalam upaya pengembangan masyarakat yang berorientasi pedesaan¹⁶⁹. *Keempat*, lahirnya putusan Tarjih tentang bunga bank berdasarkan hasil Mukhtar Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tanggal 27-31 Agustus 1968. Mukhtar ini menghasilkan keputusan tentang hukum bunga bank. Dimana bunga bank dari bank milik negara hukumnya termasuk perkara *mutasyabihat*, sementara bunga bank dari bank swasta hukumnya disamakan dengan riba, yaitu haram.¹⁷⁰ Debat dan diskusi mengenai hukum bunga bank sangat mengemuka di kalangan Muhammadiyah dan umat Islam, bahkan cenderung kurang produktif. Sebab lebih mengemuka dalam wacana tentang riba¹⁷¹ dan

169 Abdul Munir Mulkhan, 1990, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 115.

170 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: halaman 369.

fiqh ekonomi, tetapi sulit melahirkan terobosan dalam pengembangan perbankan maupun perekonomian umat, kecuali upaya ikut mendorong terbentuknya perbankan syariah (bank Islam)¹⁷². Padahal kemajuan perekonomian sangat tergantung pada sistem perbankan, sehingga siapa yang menguasai perbankan, ia akan menguasai ekonomi, dan siapa yang menguasai ekonomi akan menguasai sektor-sektor kehidupan lainnya, termasuk politik, sosial, pendidikan, budaya, dan lain-lain. *Kelima*, dinamika dan orientasi kebijakan ekonomi Muhammadiyah yang belum mapan alias masih mencari bentuk pengembangan ekonomi yang terbaik bagi umat, menjadikan Majelis Ekonomi Muhammadiyah dan Muhammadiyah sebagai persyarikatan kurang dapat memberikan kontribusi signifikan sebagaimana dalam aspek pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

Upaya revitalisasi ekonomi umat yang dilakukan Muhammadiyah dalam bentuk kebijakan dan program persyarikatan dapat ditelusuri berdasarkan sejarah pembentukan Majelis Ekonomi Muhammadiyah dan garis besar kebijakan ekonomi Muhammadiyah yang ditetapkan di

dapat di dalam 4 surat, yakni: QS. Rum, 30: 39; al-Baqarah, 2: 275, 276, 278, 279; Ali Imran, 3: 130, 135; al-Nisa, 4: 161. Riba termasuk dosa besar (al-kabair). Hal ini mengacu hadits Nabi SAW: "Laanaallahu aakillarriba wamuakkilahu wasahidaihi wakatibahu" (Allah melaknat orang yang menerima riba, yang memberi riba, saksi-saksi, dan penulisnya) [HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi]. Kemudian hadits: "Lidirhamin riban asaddu indallahi ta'ala min sittin watsalatsina zanban filkhota'i" (1 dirham hasil riba sama dengan lebih dari 36 kali hukuman berzina) [HR. al-Daruqutni]. Adapun illat dilarangnya riba adalah karena adanya penghisapan dan pemerasan [*adh'afan mudha'afah, faahisyah, wadzaru ma baqiya minarriba, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tudlamun, wa'aklihim amwaalan nasi bilbatil*]. Sementara hikmah dilarangnya riba adalah: 1). Menimbulkan permusuhan dan mengikis kerjasama; 2). Menimbulkan mental malas, foya-foya, penimpun harta; 3). Bentuk penja-jahan dan penghisapan atas sesama. (Lihat Fathurrahman Djamil, 1995, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos Publishing House, halaman 120-133.

172 Perbankan syariah atau perbankan Islam (*Arab*: *ايمال سلالا في رصم* *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam *agama Islam* untuk meminjamkan atau memungut *pinjaman* dengan mengenakan *bunga pinjaman* (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Perbankan Syariah atau bank Islam merupakan obsesi umat Islam sejak lama. Karena itu, setelah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) di Dubai tahun 1975 didoronglah untuk membentuk bank Islam di negara-negara Islam termasuk Indonesia. Tahun 1973 di Filipina berdiri Philippine Amanah Bank, di Sudan dan Mesir didirikan Faisal Islamic Bank, tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House di Kuwait. Setelah itu berdiri bank Islam bukan hanya di Arab melainkan di Swiss, Luxembourg, Denmark, Inggris dan Afrika Utara. Selanjutnya didirikan pula Bank Islam di Pakistan tahun 1979, di Malaysia tahun 1983, dan di Indonesia tahun 1991. (Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah dan Surlingo Kumaya, *Ibid*, halaman 323-324).

setiap Muktamar. Pada Muktamar ke-41 di Solo tahun 1985 diputuskan untuk membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah, sebuah majelis atau lembaga di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang lebih diorientasikan pada upaya advokasi dan pemberdayaan ekonomi kecil menengah ketimbang menyelesaikan problem besar ekonomi umat yang mengalami kemunduran dan tergilas ekonomi kapitalis modal besar dalam wujud MNC (*Multinational Corporate*) dan TNC (*Transnational Corporate*) yang melakukan monopoli dan oligopoli dalam perdagangan.

Apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam hal ekonomi dapat ditelusuri berdasarkan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah di setiap periode muktamar. *Pertama*, berdasarkan hasil Keputusan Muktamar ke-41 di Solo terdapat 6 (enam) program Majelis Ekonomi Muhammadiyah, yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan ke arah peningkatan ekonomi anggota keluarga dengan antara lain penyebaran petunjuk-petunjuk praktis, kursus-kursus ketrampilan dan sebagainya.
2. Menghimpun usahawan-usahawan Muhammadiyah, meningkatkan mutu serta kemampuannya dengan dilandasi ajaran Islam, sehingga mampu memberikan sumbangan dan darma baktinya untuk kepentingan agama, negara, dan masyarakat.
3. Menggerakkan usahawan-usahawan Muhammadiyah dalam usaha-usaha praktis dan mengusahakan adanya suatu pilot proyek usaha ekonomi yang bersifat nasional.
4. Menggerakkan dan mendorong usaha perkoperasian dalam usaha meningkatkan kehidupan ekonomi anggota/keluarga.
5. Menggerakkan Ikatan Pengusaha Muhammadiyah.
6. Perlu menggalakkan bentuk-bentuk usaha produktif di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha perdagangan di kalangan anggota Muhammadiyah dan bagi tingkat Pimpinan.

Kedua, kebijakan bidang Ekonomi dan Kewiraswastaan berdasarkan hasil Keputusan Muktamar ke-42 di Yogyakarta tahun 1990, yaitu:

1. Mengembangkan perekonomian rakyat kecil/masyarakat lapisan bawah di pedesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka ke tingkat yang lebih baik seperti melalui

usaha bersama/koperasi, usaha rumah tangga, peternakan, usaha tani produktif, pengembangan sektor informal, dan usaha lainnya. Dalam pelaksanaan program ini ditempuh melalui kerjasama dengan lembaga yang terkait, di samping mengembangkan usaha swadaya.

2. Meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam menciptakan sistem perekonomian nasional yang adil dan merata sebagaimana yang menjadi prinsip Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila, guna menghilangkan atau mengurangi seoptimal mungkin kesenjangan sosial ekonomi, terangkatnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat kecil, hilangnya eksploitasi dan monopoli dan praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan hajat hidup orang banyak.
3. Meningkatkan etos kerja dan kesadaran berwiraswasta di kalangan masyarakat khususnya warga Muhammadiyah dan umat Islam, serta ikut mengembangkan iklim yang sehat bagi terciptanya kemandirian umat dalam perekonomian.
4. Mendorong dan ikut menciptakan iklim serta memanfaatkan para pengusaha Muhammadiyah maupun pengusaha muslim lainnya dalam menggarap sektor-sektor perekonomian modern dalam rangka membangun perekonomian umat Islam yang tangguh di masa datang.
5. Ikut berpartisipasi dalam menanggulangi pengangguran antara lain dengan mendirikan lembaga-lembaga balai latihan kerja yang dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja melalui BLK-BLK setempat, di samping mengembangkan kursus-kursus ketrampilan lainnya.
6. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

Ketiga, kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial & Ekonomi berdasarkan hasil Keputusan Muktamar ke-43 di Aceh tahun 1995, yaitu:

1. Bimbingan peningkatan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, pengolahan limbah beserta pemasarannya bagi jama'ah pengajian dan masjid dengan persontohan di setiap daerah.
2. Kursus-kursus keterampilan sesuai lapangan kerja bekerjasama dengan instansi terkait, perusahaan manufaktur dan jasa di setiap

3. Pengembangan pendidikan, perlindungan dan penyediaan pramuwisma dan TKI di tiap wilayah.
4. Pembentukan pusat pelayanan pemasaran dan modal usaha di setiap daerah dan wilayah.
5. Pendirian BUMM pertanian, perikanan, jasa dan manufaktur bekerjasama dengan amal usaha, tahap pertama di tingkat nasional.
6. Pengembangan forum komunikasi pengusahaan di tiap daerah dan wilayah.
7. Menyusun sistem ekonomi dan manajemen sesuai visi dakwah.
8. Jaminan asuransi kecelakaan dan kesehatan muballigh dan pimpinan persyarikatan di setiap daerah dan wilayah.
9. Jaminan transportasi kerja muballigh daerah dan wilayah.
10. Pencangkakan kerja muballigh dalam amal usaha pendidikan dan kesehatan.
11. Perlindungan masyarakat lapisan bawah dan pekerja kasar seperti buruh akibat perluasan kawasan industri melalui pengembangan hidup jama'ah terutama di lingkungan buruh.
12. Penyuluhan dan pelatihan sistem inventarisasi/administrasi wakaf harta benda Muhammadiyah untuk optimalisasi pemanfaatan demi tercapainya tujuan persyarikatan, khususnya dalam bidang ekonomi/sosial.
13. Melaksanakan inventarisasi pengusaha Muhammadiyah di Cabang, Daerah, dan Wilayah serta mengadakan pelatihan dan memberi dukungan moral kepada pengusaha Muhammadiyah untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan.
14. Membentuk balai kesejahteraan sosial (BAKESOS) pada sekurang-kurangnya satu daerah di setiap wilayah, sebagai proyek percontohan penggalakan kepedulian ummat dalam rangkaian usaha revitalisasi cabang dan ranting.
15. Pemasyarakatan program pembinaan kesehatan ummat (BINKESMAT) melalui penyuluhan hidup sehat.
16. Meningkatkan jumlah dan mutu amal usaha kesehatan.
17. Membentuk pusat-pusat informasi dan konsultasi keluarga sakinah dan masalah kependudukan serta keluarga sejahtera pada umumnya.
18. Meratakan pembentukan Majelis Wakaf hingga terbentuk di semua daerah dan meningkatkan kemampuan kerja dengan melibatkan tenaga profesional, baik langsung sebagai anggota pimpinan maupun sebagai konsultan/dewan pakar.

19. Memperbanyak buku tuntunan serta penyelenggaraan lokakarya-lokakarya untuk meningkatkan profesionalisme pengelola amal usaha sosial.
20. Menyiapkan kader-kader Muhammadiyah pada daerah-daerah yang berpotensi untuk diterjunkan sebagai tenaga sukarela, baik atas nama pribadi atau pun resmi mewakili Muhammadiyah, dalam program-program swadaya masyarakat, program LKMD, IDT, KUD dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah pada Muktamar ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh diubah menjadi Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah (MPEM). Perubahan nama tersebut ditujukan agar terjadi perubahan orientasi majelis yang fokus pada misi pemberdayaan dan pembinaan ekonomi umat. Sekalipun pada Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta nama Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah (MPEM) diubah kembali menjadi Majelis Ekonomi Muhammadiyah, namun pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta nama Majelis Ekonomi diubah menjadi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah. Perubahan nama ini diharapkan agar Majelis Ekonomi Muhammadiyah pada saat ini tidak hanya fokus pada penyikapan ekonomi global dan perbaikan ekonomi umat, melainkan Majelis Ekonomi Muhammadiyah juga *concern* dalam upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan Muhammadiyah dan umat Islam, terutama dalam upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga tercipta kemandirian dan ketahanan ekonomi umat.

Keempat, berdasarkan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta ditetapkan program kerja bidang ekonomi dan kewirausahaan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sistem JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah) sebagai revitalisasi gerakan da'wah secara menyeluruh disertai dengan penetetapan:
 1. Buku "Paradigma Baru Muhammadiyah Revitalisasi Gerakan Da'wah dengan Sistem JAMIAH" sebagai acuan program lebih lanjut.
 2. Proram KATAM ditetapkan sebagai program dasar bagi perwujudan sistem JAMIAH.
 3. Membangun infrastruktur pendukung JAMIAH melalui antara

lain infrastruktur komunikasi dan infrastruktur distribusi (program MARKAZ).

- b. Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep pengembangan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan keislaman seperti mengenai etos kerja, etos kewiraswastaan, etika bisnis, etika manajemen, masalah monopoli-eligopoli-kartel, keuangan dan permodalan, teori ekonomi Islam, etika profesi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktual yang terjadi dalam dunia ekonomi.
- c. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi pengembangan sumberdaya manusia dalam aspek ekonomi, pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan masyarakat, pengembangan Bank Syari'ah Muhammadiyah, pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil, pengembangan koperasi, dan pengembangan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang benar-- benar konkret dan produktif, seperti: KATAM, BMT, LKM, dll.
- d. Intensifikasi pusat data ekonomi dan pengusaha Muhammadiyah yang dapat mendukung pengembangan program-program ekonomi.
- e. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program ekonomi dan kewiraswastaan di lingkungan Muhammadiyah.
- f. Mengembangkan pelatihan-pelatihan dan pilot proyek pengembangan ekonomi kecil dan menengah baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga luar sesuai dengan perencanaan program ekonomi dan kewiraswastaan Muhammadiyah.
- g. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi Bisnis dan Kewiraswastaan di bawah Majelis Ekonomi.

Kelima, berdasarkan Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang Jawa Timur ditetapkan Program Nasional Bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), dan Pemberdayaan Ekonomi sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan arbitrase harta benda Persyarikatan yang diperoleh dari wakaf.
- b. Menumbuhkan semangat kewirausahaan (*entrepreneur*) untuk mendorong kemampuan dan daya saing sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi umat.

- c. Membangun sinergi usaha dengan kelompok ekonomi lain untuk mengangkat Usaha Kecil Menengah di lingkungan Persyarikatan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi umat.
- d. Pengembangan BMT yang terkait dengan pemanfaatan fungsi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
- e. Mengembangkan berbagai usaha ekonomi yang betul-betul selektif, terencana, dan berkesinambungan, dengan menitikberatkan perhatian pada pengembangan ekonomi rakyat.
- f. Mengintensifkan pelaksanaan, penertiban, dan pengelolaan sertifikasi tanah-tanah wakaf Muhammadiyah.
- g. Meningkatkan pembinaan dan jaringan lembaga-lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sehingga memiliki fungsi yang efektif, produktif, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.

Keenam, berdasarkan Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Jakarta ditetapkan Program Nasional Bidang Ekonomi dan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sebagai berikut :

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya kapasitas dan bangkitnya kembali etos ekonomi Muhammadiyah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

b. Program Pengembangan

1. Mengembangkan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan BTM/ BMT sebagai wadah kerjasama dan pemberdayaan antar pelaku usaha ekonomi di lingkungan Persyarikatan menuju pada kekuatan dan kemandirian Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi.
2. Meningkatkan pembinaan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha ekonomi umat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis yang intensif dan sistematis.
3. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat.
4. Mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan pemerintrah, swasta dan lembaga-lembaga lain dalam program-program pemberdayaan ekonomi khususnya ekonomi mikro, kecil dan menengah yang berdampak langsung dalam membangun kekuatan

masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu'afa dan mustadh'afin melalui model-model ekonomi kreatif.

5. Mengembangkan usaha/bisnis ritel barang konsumsi dan usaha-usaha unggulan yang memiliki nilai tambah yang tinggi disertai dengan dukungan permodalan, sumberdaya manusia, dan jaringan yang kuat di seluruh lingkungan Persyarikatan.
6. Mengembangkan jumlah dan kualitas BMT (*Baitul Mal wa Tanwil*) Muhammadiyah disertai peningkatan mutu sumberdaya manusia, tata kelola, jaringan, dan kerjasama untuk mencapai tingkat keunggulan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat/masyarakat.
7. Peningkatan gerakan ekonomi di kalangan warga Muhammadiyah disertai pembentukan mentalitas dan budaya kewirausahaan serta berbagai pelatihan sehingga terbangun kondisi dan infrastruktur Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi.
8. Mengembangkan jaringan lembaga keuangan mikro (syari'ah) di lingkungan Persyarikatan untuk memperkuat kemampuan BTM/BMT melalui suatu wadah kerjasama yang mampu berperan meningkatkan akses kepada sumberdaya ekonomi khususnya pendanaan, selain meningkatkan kemampuan manajemen BTM/BMT dan pengorganisasiannya dalam sistem organisasi Muhammadiyah.
9. Meningkatkan pengentasan kemiskinan dengan instrumen ZIS dan usaha-usaha ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi khususnya yang berskala kecil, mikro, dan menengah dengan memanfaatkan berbagai jaringan yang dimiliki Muhammadiyah termasuk yang berbasis di cabang dan Ranting.
10. Meningkatkan kualitas sumberdaya, organisasi dan manajemen, administrasi, sinergi, dan pelayanan dalam menggerakkan pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf dan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dengan memobilisasi seluruh potensi.
11. Optimalisasi usaha-usaha penggalan, pencarian, dan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah secara lebih proaktif, terorganisasi, dan terkelola dengan prinsip tatakelola yang baik melalui Lembaga ZIS Muhammadiyah.
12. Pengembangan pemanfaatan fungsi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah ke hal-hal yang lebih produktif selain yang bersifat kedermawanan.

13. Meningkatkan pembinaan dan jaringan lembaga-lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sehingga memiliki fungsi yang efektif, produktif, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.
14. Meningkatkan kemitraan ekonomi dengan lembaga-lembaga ekonomi di ASEAN dalam mengantisipasi ASEAN Charter dan pergeseran pusat geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya ke China, yang dilaksanakan secara tersistem dengan kebijakan Persyarikatan.

Tetapi jika dicermati, secara umum arah garis besar kebijakan ekonomi Muhammadiyah sejak tahun 1985 hingga 2025 dapat dilihat berdasarkan "*Kerangka Kebijakan Program Muhammadiyah Jangka Panjang (Visi Muhammadiyah 2025)*" yang ditetapkan dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang Jawa Timur dan dicantumkan kembali dalam hasil Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta. Garis besar Program Bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dan Pemberdayaan Ekonomi tersebut meliputi:

a. Rencana Strategis:

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah-melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

b. Garis Besar Program:

1. Menciptakan cetak biru (*blue print*) pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi umat yang efektif.
2. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat
3. Menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu'afa dan mustadh'afin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif.
4. Peningkatan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan akuntabilitasnya sehingga menjadi penunjang kekuatan ekonomi

5. Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat dan terorganisasi dengan tersistem.
6. Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perluasan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan.
7. Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif.

Ekonomi Muhammadiyah: Kuat di Isu, Lemah dalam Aplikasi Gerakan

Muhammadiyah sesungguhnya memiliki kepekaan dan pandangan ekonomi yang cukup lugas dan bernas. Hal tersebut terlihat dari pandangan dan kritik Muhammadiyah terhadap perekonomian nasional dan dunia. Muhammadiyah melihat bahwa berbagai kemajuan ekonomi yang telah dicapai Indonesia yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita yang terus meningkat, stabilitas ekonomi yang terus terpelihara, serta berbagai program pengembangan ekonomi untuk masyarakat kecil menengah belumlah cukup mengatasi berbagai problem ekonomi Indonesia, seperti ketahanan ekonomi Indonesia masih lemah dan rentan, pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu investasi asing, utang luar negeri dan konglomerasi, sehingga hasil pembangunan hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, dan sendi kehidupan sosial ekonomi nasional tumbuh tanpa sokongan akar yang kuat. Menurut Muhammadiyah beberapa persoalan ekonomi tersebut bersumber pada:

- 1). Paradigma ekonomi yang tidak konsisten antara paradigma ekonomi Pancasila (ekonomi kerakyatan) atau paradigma ekonomi liberal;
- 2). Struktur ekonomi dualistik;
- 3). Kebijakan fiskal yang belum mandiri;
- 4). Sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak; dan
- 5). Kebijakan perdagangan dan industri yang liberal.

Karena itu menurut Muhammadiyah perlu dilakukan revitalisasi ekonomi yang mencakup upaya sebagai berikut: *Pertama*, menguatkan sistem ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua*, mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan; *Ketiga*, menciptakan struktur ekonomi yang lebih sehat dan adil; *Keempat*, melaksanakan reformasi agraria; *Kelima*, menjalankan kebijakan fiskal dan keuangan yang lebih mandiri; *Keenam*, meningkatkan daya saing produk domestik.

menciptakan kebijakan perdagangan dan industri yang berdaya saing.¹⁷³

Sementara itu, dalam upaya pengembangan ekonomi sejak kelahiran Majelis Ekonomi Muhammadiyah hingga saat ini sebetulnya secara umum mungkin hanya menekankan pada 3 (tiga) program saja, yaitu: 1) mengelola dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah sebagai Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang merepresentasikan kekuatan ekonomi persyarikatan; 2) mengembangkan wadah koperasi simpan pinjam, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) atau *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), atau lembaga keuangan mikro lainnya bagi kebutuhan anggota Muhammadiyah dan umat¹⁷⁴; dan 3) memberdayakan anggota Muhammadiyah dalam mengembangkan usaha ekonomi kecil menengah milik anggota Muhammadiyah.

Majelis Ekonomi Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara khusus dalam perkembangannya lebih banyak melakukan upaya pembiayaan dan penguatan ekonomi mikro dan koperasi dengan ikut mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank, dan *Baitul Mal wal Tamwil* (BMT) atau *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM)¹⁷⁵. Sedang selebihnya Muhammadiyah

173 Haedar Nashir, dkk., 2009, *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa. Agenda Indonesia ke Depan*, Yogyakarta: Penerbit Pimpinan Pusat Muhammadiyah, halaman 14-18 dan 33-37.

174 Muhammadiyah pada Periode Kyai A.R. Fakhruddin melakukan kerjasama dengan group Matahari untuk mendirikan tidak kurang 100 buah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Ekonomi Muhammadiyah tahun 1989 di Ciawi Bogor, dimana selain mendirikan BPR juga membentuk tim kerja perbankan yang akan mengurus koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan bukan bank. Berkaitan dengan BPR, Kyai A.R. Fakhruddin menekankan 2 (dua) hal, yaitu BPR jangan memakai bunga berbunga (riba), dan *kedua*, meskipun nasabahnya kebanyakan warga Muhammadiyah, tetapi jangan memakai nama Muhammadiyah. Hal ini untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan dan pengembangan BPR, serta untuk lebih memperluas dakwah Muhammadiyah dalam membantu kebutuhan keuangan umat sekaligus untuk lebih memperbanyak jumlah nasabah BPR. (Lihat Sutrisno Kutoyo, *Ibid*, halaman 324-325)

175 BTM adalah kependekan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah atau nama lain dari *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

lebih banyak berkuat dengan perdebatan seputar isu dan status hukum atas bunga bank, asuransi, perdagangan saham dan valas ataupun mengenai etika bisnis (Pedoman Hidup Islami Dalam Berbisnis).

Di dalam "*Pedoman kehidupan Islami Warga Muhammadiyah*" yang merupakan hasil dari Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tanggal 8 s/d 11 Juli tahun 2000, terutama di Bagian Ketiga: Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah huruf f tentang Kehidupan dalam Berbisnis disebutkan 13 (tiga belas) pokok pedoman dalam berbisnis, yaitu:

1. Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela (*taradlin*).
2. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis, maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip mu'amalah dalam Islam. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut orang dapat pula menjadi pemimpin, maupun menjadi anak buah secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang telah menyepakatinya.
3. Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern (organisasi) maupun dengan pihak luar (partner maupun pelanggan). Sukarela dan adil mengandung arti tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip sukarela dan

prinsip kedudukan BTM sama seperti AUM yang lain seperti sekolah, rumah sakit dan panti asuhan, tetapi karena ini lembaga bisnis, maka manajemen memiliki ke-

keadilan harus dilandasi dengan kejujuran.

4. Hasil dari aktivitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (maal) pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya dengan halal dan baik. Karenanya terdapat kewajiban zakat dan tuntutan shadaqah, infaq, wakaf, dan jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.
5. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (1) usaha berupa aktivitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (*taradlin*), (2) waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahliwarisnya, (3) wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta-pusaka yang diwariskan, dan (4) hibah, yaitu pemberian sukarela dari/kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta yang paling terpuji.
6. Kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang-piutang (*qardlun*), maupun pinjaman (*ariyah*). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang (utang uang dan kemudian dibelikan barang, misalnya), maka sudah pasti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Dalam hal utang ini juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan di kemudian hari, dan tidak memberatkan diri, serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang berutang. Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menunda-nunda, sedangkan bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang didapat dari pinjaman (*ariyah*), artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa

kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya.

7. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadang kala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan itu dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan. Dalam persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, dan dapat dimasukkan pada pengertian *fastabiiq al khairat* sehingga tercapai bisnis yang mabrur.
8. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis-ekonomi ini kadang kala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rejeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong-menolong selalu dianjurkan agama dan ini dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang lain dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang kesusahan, mereka yang sukses didorong untuk menolong mereka yang gagal, mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi. Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong¹⁷⁶ dan inkar akan nikmat Tuhan¹⁷⁷, sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah¹⁷⁸.
9. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihabur-hamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu

juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik¹⁷⁹.

10. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtirakan untuk lebih baik dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan seperti itu harus diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan-bisnis merupakan suatu anjuran yang harus diperhatikan¹⁸⁰.
11. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan apapun kalau diserahkan pada orang yang tidak mampu hanya akan membawa kepada kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bisa dilatih dan dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yang mampu untuk melatih dan mengajar orang yang kurang mampu.
12. Semakin besar usaha bisnis-ekonomi yang dijalankan biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke-waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis member manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.
13. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai

176 Q.S. Al-Isra/17: 37, Luqman/31: 18

177 Q.S. Ibrahim/14: 7

178 Q.S. Yusuf/12: 87; Al-Hijr/15: 55, 56; Az-Zumar/39: 53

179 Q.S. Al-Baqarah/2: 282

180 Q.S. Al-Hasyr/59: 18

kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya.

7. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadang kala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan itu dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan. Dalam persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, dan dapat dimasukkan pada pengertian *fastabiiq al khairat* sehingga tercapai bisnis yang mabrur.
8. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis-ekonomi ini kadang kala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rejeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong-menolong selalu dianjurkan agama dan ini dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang lain dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang kesusahan, mereka yang sukses didorong untuk menolong mereka yang gagal, mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi. Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong¹⁷⁶ dan inkar akan nikmat Tuhan¹⁷⁷, sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah¹⁷⁸.
9. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu

juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik¹⁷⁹.

10. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtirakan untuk lebih baik dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan seperti itu harus diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan-bisnis merupakan suatu anjuran yang harus diperhatikan¹⁸⁰.
11. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan apapun kalau diserahkan pada orang yang tidak mampu hanya akan membawa kepada kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bisa dilatih dan dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yang mampu untuk melatih dan mengajar orang yang kurang mampu.
12. Semakin besar usaha bisnis-ekonomi yang dijalankan biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke-waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis member manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.
13. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai

176 Q.S. Al-Isra/17: 37, Luqman/31: 18

177 Q.S. Ibrahim/14: 7

178 Q.S. Yusuf/12: 87; Al-Hijr/15: 55, 56; Az-Zumar/39: 53

179 Q.S. Al-Baqarah/2: 282

180 Q.S. Al-Hasyr/59: 18

dengan syariat. Di samping itu dianjurkan untuk memberi infaq dan shadaqah sebagai perwujudan rasa syukur atas n'imat rejeki yang dikaruniakan Allah kepadanya.

Namun begitu, pada periode Majelis Ekonomi Muhammadiyah di bawah kepemimpinan M. Dawam Rahardjo dengan Sekretarisnya M. Jaya Nasti di tahun 1999 sampai 2003-an terpikirlah pengembangan ekonomi skala makro, yaitu sebuah skema industri atau perusahaan besar Muhammadiyah. Kemudian dirintislah korporasi Muhammadiyah yang diberi nama PT. Solar Global Internasional (PT. SGI). Dengan bekal dukungan anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang berjumlah puluhan juta, ribuan jaringan amal usaha pendidikan, kesehatan, dan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia, dan tersedianya sumberdaya manusia terdidik dan terlatih, maka berarti terdapat pasar yang begitu besar. Oleh karena itu, tim Majelis Ekonomi Muhammadiyah kemudian menjadikan PT. SGI sebagai *holding Company* yang membawahi beberapa anak perusahaan yang terdiri dari: *Pertama*, PT. Solar Sentra Distribusi (PT. SSD) yang dimaksudkan sebagai cikal bakal perusahaan ritail Muhammadiyah, untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah akan aneka kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sebuah gerai (*outlet*) waralaba dengan nama "MARKAZ" didirikan di beberapa kota di Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta. PT. SSD juga merintis kerjasama kemitraan dengan berbagai pemasok kebutuhan ritail, seperti dengan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., Unilever, Nestle, dan sebagainya. *Kedua*, PT. Solar Motor, yaitu sebuah perusahaan yang dirancang bergerak di bidang distribusi *spare part* mobil, dengan membuat *outlet* yang menjual berbagai suku cadang (*spare part*) mobil dengan sistem waralaba. *Ketiga*, PT. Solar Usahamina –dalam perkembangannya diubah namanya menjadi PT. Solar Sahara Usahamina (PT. SSU)-- yang bergerak di bidang budidaya ikan kerapu, yaitu pembenihan dan pembesaran ikan kerapu dalam rangka merespon tawaran berbagai pihak dan permintaan pasar Jepang yang besar. PT. SSU berhasil membangun sebuah kompleks bangunan pembenihan ikan kerapu (*hatchery*) di pinggir pantai Desa Gondol, Kabupaten Buleleng Bali, sekaligus menguasai teknologi budidaya pembenihan dan pembudidayaan ikan kerapu melalui media keramba jaring apung.¹⁸¹

181 M. Jayanasti dikutip dari Mukhaer Pakkanna, 2005, *Membangun Gerakan Ekonomi Muhammadiyah dari Dekonstruksi ke Menuju Rekonstruksi Teologi*, dalam

Selanjutnya PT SGI sebagai *holding company* juga mendirikan beberapa anak perusahaan lain yaitu: didirikannya PT. Solar Amaru Internasional yang menggarap potensi bisnis di bidang alat tulis kantor (ATK) pada sekolah, perguruan tinggi dan amal usaha Muhammadiyah lainnya. Bisnis pertama yang dirancang adalah produksi buku tulis yang akan dijual di sekolah Muhammadiyah dengan harga yang lebih murah dari yang di pasaran. Sedangkan untuk menggarap bisnis distribusi pertanian didirikan PT. Solar Solunatama, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembelian hasil pertanian untuk memasok supermarket dan pasar swalayan. Selain itu, PT SGI bekerjasama dengan Bank BNI membuat kartu multiguna yang diberinama KATAM (Kartu Tabungan Muslimin), sebuah kartu yang berfungsi sebagai kartu tanda anggota Muhammadiyah, sekaligus kartu iuran, asuransi kesehatan, dan kartu untuk transaksi perbankan. Dimana untuk memberikan pelayanan asuransi kesehatan tersebut digandenglah perusahaan asuransi mutinasional *Chupp* dan untuk memperkuat program KATAM dan *E-Learning* digandenglah *Straight Effort, Sdn Berhard* dari Malaysia. Bersamaan dengan itu untuk menunjang perkembangan berbagai usaha PT. SGI di atas, maka dibuatlah infrastruktur dan *software* berbasis teknologi informasi (IT) yang diberinama JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah).¹⁸²

Sementara untuk memenuhi permodalan berbagai anak perusahaan dan pengadaan berbagai komoditas *trading* dibuatlah PT. Solar Sahara Investment (PT. SSI), yakni sebuah perusahaan *joint venture* antara PT. SGI dengan *World Islamic Call Society* (WICS), sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki hubungan langsung dengan penguasa Libya saat itu, yakni Kolonel Muamar Khadafi. Tetapi dalam perkembangannya PT. SSI tidak berkembang baik dan tidak dapat memecahkan kesulitan permodalan berbagai anak perusahaan di bawah PT. SGI dan pengadaan berbagai komoditas *trading*. Hal ini disebabkan pihak WICS melihat kerjasama itu sebagai bisnis murni, bukan bagian dari keinginan untuk membantu kesulitan usaha Muhammadiyah. Padahal PT. SSI telah melakukan berbagai bisnis perdagangan (*trading*) yang bersifat

Mukhaer Pakkanna dan Nur Achmad (editor), 2005, *Muhammadiyah Menjemput Perubahan. Tafsir Baru Gerakan Sosial-ekonomi-Politik*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara bekerjasama dengan P3SE STIE Ahmad Dahlan, halaman 185-195

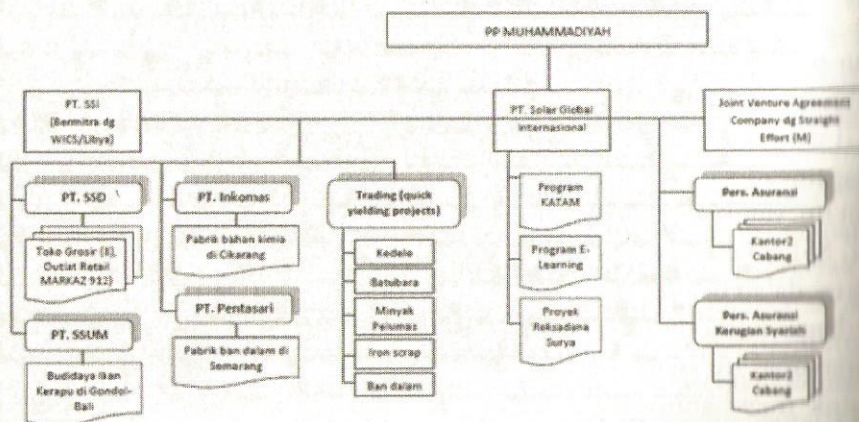
182 Mukhaer Pakkanna, *Ibid*

"quick yielding project", seperti memasok kedelai (bekerjasama dengan INKOPTI), memasok batubara, minyak pelumas dan besi tua untuk Pertamina, pemasaran ban dalam yang diproduksi PT. Pentasari yang berlokasi di Semarang (sebuah perusahaan akuisisi dari PT. SSI), serta mengakuisisi PT. Inkomas Lestari yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang yang bergerak dalam usaha produksi bahan kimia "stabilizer" yang digunakan untuk campuran pembuatan berbagai produk plastik, seperti: paralon, kabel listrik, radio, televisi, dan sebagainya.

Keseluruhan bisnis yang dibangun dalam sebuah *holding company* PT. SGI tidak dapat berjalan sesuai harapan, sehingga akhirnya berbagai perusahaan tersebut gulung tikar atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Kondisi ini menurut Sudibyo Markus terjadi karena

Muhammadiyah mirip dengan rumah kaca. Orang boleh saja melihat 'seksinya' pangsa pasar dan potensi jaringan bisnis Muhammadiyah yang sangat besar, namun setelah masuk ternyata banyak terdapat halangan dan sekat-sekat atau potensi bisnis yang kelihatan seperti fatamorgana kata M. Jayanasti¹⁸³.

Adapun keseluruhan *holding company* dan anak perusahaan PT. SGI secara utuh dapat digambarkan di dalam **skema bagan struktur PT. SGI** di bawah ini, yaitu:¹⁸⁴



Selain itu, dalam upaya untuk memenuhi penyediaan keuangan bagi kepentingan bisnis Muhammadiyah dan amal usahanya, pada tahun 2004

PP. Muhammadiyah mengakuisisi Bank Swansarindo Internasional dan diubah namanya menjadi Bank Persyarikatan Indonesia (BPI). Namun dalam perkembangannya BPI tidak terkelola dengan baik, disebabkan problem likuiditas yang berat. Dimana dananya sudah habis sedangkan aktiva produktifnya ternyata banyak yang tidak sehat, karena berbagai proyek bisnis yang dibiayai kredit BPI tidak berjalan dengan baik, seperti kredit macet akibat akuisisi pusat perkulakan GORO dan pengelapan investasi PT. Pertamina Saving investment (PT. PSI) dalam bentuk *Negotiable Certificate of Deposito* (NCD) sebesar 130 milyar oleh Lulu Harsono (Direktur Utama BPI). Selain itu, manajemen BPI yang terdiri atas jajaran komisaris (M. Dawam Rahardjo selaku Komisaris Utama BPI), Hajriyanto Y. Thohari (selaku Wakil Komisaris Utama BPI) dan Ir. Bambang Irijanto, MBA (selaku Komisaris BPI), serta jajaran direksi yang dipimpin Lulu Harsono dinilai kurang memenuhi aspek kepatutan, tidak kredibel, transparan dan profesional dalam mengelola BPI.

Itulah kenapa BPI masuk dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) Bank Indonesia (BI) karena salah satu dari masalah rasio kredit bermasalah (NPL), rasio kecukupan modal (CAR) atau likuiditasnya minus. BI memberi waktu 3 (tiga) bulan kepada BPI untuk menambah modal bagi kesehatan keuangan BPI yang bermasalah akibat NPL yang mencapai 23,29%. Kemudian BPI mengandeng investor luar untuk masuk BPI. Setelah tidak tercapainya kesepakatan dengan investor lokal dan investor Malaysia Azli Arif (AA), akhirnya dengan difasilitasi oleh M. Jusuf Kalla, Bank Bukopin bersedia mengakuisisi BPI pada tahun 2008 dan menjadikannya Bank Bukopin Syariah.

Penutup

Dengan melihat perkembangan ekonomi Muhammadiyah sebagaimana disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dan problem dasar dalam bisnis dan pengembangan ekonomi di Muhammadiyah, yaitu:

1. Kegagalan dalam mengurus PT. SGI dengan anak perusahaannya dan Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) diakibatkan ekspektasi yang tinggi tidak diimbangi perencanaan dan kebijakan ekonomi yang utuh dan integratif, adanya "pasar semu" Muhammadiyah, *human capital* atau sumberdaya manusia yang kurang memadai, serta kurang tersedianya atau kesulitan modal usaha. Korporasi

183 Mukhaer Pakkana, *Ibid*, halaman 193

184 Mukhaer Pakkana, *Ibid*

besar PT. SGI yang dibangun Muhammadiyah dibangun dari atas (*top down*) dalam jangka waktu yang singkat tanpa perencanaan matang dan dukungan pasar, modal, dan sumberdaya manusia yang memadai.

2. *Concern* Muhammadiyah dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kecil menengah dan kewirausahaan, termasuk pendirian koperasi, BMT atau BTM, dan lembaga keuangan mikro kurang terintegrasi dengan keseluruhan kebijakan ekonomi Muhammadiyah, sehingga upaya membesarkan ekonomi Muhammadiyah dan umat seringkali timpang dan sulit berkembang.
3. Muhammadiyah dan umat Islam secara keseluruhan lebih banyak terjebak pada isu fiqh ekonomi, seperti bunga bank, asuransi, koperasi simpan pinjam, saham, valas, dan lainnya. Akibatnya energi umat banyak terbuang untuk hal-hal yang sifatnya diskursus, sehingga kurang bertenaga dalam aplikasi/penerapan ekonomi di lapangan.
4. Akuntabilitas amal usaha masih rendah. Hal ini ditandai oleh kenyataan pengelolaan sebagian besar amal usaha kurang profesional, laporan keuangan kurang transparan, dan lemahnya sinergitas antaranya amal usaha dengan persyarikatan dan ortomnya.
5. Tidak adanya pusat ide (*think thank*) yang membackup keseluruhan kebijakan ekonomi yang diambil Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah memiliki ratusan perguruan tinggi dengan fakultas ekonomi di dalamnya. Semestinya Muhammadiyah mampu mendirikan pusat studi ekonomi Muhammadiyah di kampus-kampus PTM yang *concern* dalam menelorkan *blue print* gagasan, ide dan konsep autentik mengenai pengembangan dan pemberdayaan ekonomi, serta penyikapan terhadap isu dan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang.
6. Kegagalan Muhammadiyah dalam pembangunan perekonomian umat akibat kebijakan ekonomi negara yang bersifat makro, melindungi korporasi besar MNC dan TNC, serta tidak memberikan proteksi bagi usaha kecil menengah dan pedagang pribumi, padahal di sisi lain, liberalisasi ekonomi dunia yang massif dan memonopoli semua hal menjadikan umat Islam dan negara-negara berkembang kurang memiliki kemandirian ekonomi dan hanya dijadikan sebagai sasaran ekonomi atau pasar dunia untuk semua jenis produk.



UHAMKA PRESS

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7398898/ext: 112,
Website: www.uhamkاپress.com
E-mail: uhamkاپress@yahoo.co.id

ISBN 978-602-8040-67-9



9 786028 040679